

Pengembangan *Social Forestry* Pada Hutan Tanaman Melalui Pola Kemitraan Pengalaman PT. Wirakarya Sakti¹

Oleh : Dr. Ir. Hari Witono²

Pendahuluan

Dalam 5 tahun terakhir masalah keamanan di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius yang telah menyita perhatian banyak pihak tidak terkecuali perusahaan-perusahaan swasta. Masalah keamanan ini menjadi sangat sulit diatasi terutama untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam lingkup usaha yang memanfaatkan sumberdaya lahan yang luas seperti perusahaan perkebunan dan kehutanan. Gangguan oleh masyarakat sekitarnya dapat berupa penjarahan hasil produksi dan harta perusahaan, okupasi areal konsesi maupun tuntutan terhadap hak atas tanah yang secara hukum masih dalam proses perizinan maupun areal yang telah sah dikuasai dan dikelola oleh perusahaan.

Pendekatan keamanan yang berhasil diterapkan selama lebih dari 30 tahun pada masa orde baru dengan melibatkan aparat keamanan (TNI dan POLRI) tidak dapat lagi diandalkan, karena era reformasi telah menyebabkan masyarakat mengalami *euphoria* demokrasi, yang pada awalnya menuntut kebebasan berpendapat dan berekspresi, pada akhirnya menjadi masyarakat yang cenderung terlalu bebas dan tidak lagi taat akan hukum dan aturan-aturan umum yang berlaku dalam masyarakat.

Demikian halnya PT Wirakarya Sakti sebagai perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman tidak terlepas dari masalah keamanan yang di alami oleh perusahaan sejenis lainnya. Untuk mengatasi masalah keamanan tindakan represif tidak lagi merupakan tindakan yang diprioritaskan sehingga untuk itu diperlukan pendekatan baru untuk mengurangi dampak negatif dari *euphoria* demokrasi dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui program *social forestry* yang dikaitkan dengan program Pengembangan Masyarakat, dengan misi "*Mendorong manfaat ekonomi hutan dan mendorong peran serta masyarakat setempat yang kehidupannya tergantung kepada hutan baik langsung maupun tidak langsung secara turun temurun*".

Dengan misi ini perusahaan sadar bahwa pengelolaan hutan secara lestari hanya akan dicapai jika tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pelaku usaha dan sumberdaya hutan itu sendiri, sehingga dengan demikian diperlukan adanya kemitraan antara perusahaan dan masyarakat sekitarnya. Melalui pola kemitraan diharapkan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan dapat diakomodasikan.

Gambaran Singkat Masyarakat di Sekitar Perusahaan

PT. WKS dengan konsesi seluas 251,218 Ha dikelilingi oleh lebih dari 75 Desa tersebar di 16 kecamatan dan 4 kabupaten, yang sebagian merupakan desa-desa miskin terpencil dengan sarana dan prasarana fisik seperti sekolah, pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Pendapatan masyarakat sangat tergantung pada sektor pertanian dan kegiatan pemanenan/pengumpulan hasil hutan kayu yang umumnya berupa kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*). Dari konsesi tersebut baru dapat tertanam seluas 98.000 Ha.

¹ Disampaikan dalam Pekan Ilmiah Kehutanan Nasional 2003, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, 7 September 2003.

² Community Development Head PT. Wirakarya Sakti, Plaza BII, Tower 2 lantai 32, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta.

Sejalan dengan dibukanya jalan-jalan tembus dalam rangka pembangunan hutan tanaman oleh perusahaan, maka desa-desa yang sebelumnya terisolir dan terpencil saat ini menjadi daerah yang terbuka dan mudah terjangkau oleh alat angkutan. Kondisi ini telah menyebabkan peningkatan mobilitas penduduk dengan sangat pesat yang pada akhirnya menimbulkan akibat negatif bagi perusahaan, yaitu dengan munculnya tuntutan (klaim) atas areal konsesi yang sebelumnya merupakan areal yang tidak diminati.

Kemudahan masuk ke areal-areal di sekitar konsesi dan semakin sulitnya memperoleh areal bertani bagi masyarakat dan meningkatnya nilai jual tanah juga telah meningkatkan jumlah pendatang dari luar kawasan (migran) untuk mengembangkan pemukiman baru sepanjang jalan utama dan mengembangkan usaha produktif yang lebih lanjut mendorong datangnya pendatang baru lebih banyak lagi. Kegiatan para pendatang baru iri telah secara langsung meningkatkan terjadinya okupasi lahan dan klaim terhadap lahan di dalam konsesi, tanpa adanya dasar hukum yang kuat terhadap kepemilikan lahan dimaksud.

Issue Pokok

Dengan melihat kondisi masyarakat baik yang ada dalam konsesi maupun di luar konsesi, secara umum permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam kaitannya dengan masyarakat sekitarnya adalah sbb:

- Klaim terhadap lahan/hutan
- Okupasi/pemukiman liar (*illegal settlement*)
- Kesenjangan ekonomi dan sosial antara masyarakat dan perusahaan
- Lemahnya kemampuan masyarakat untuk memberdayakan diri
- Lemahnya dukungan pemerintah dalam mengatasi konflik antara masyarakat dengan perusahaan
- Menurunnya kualitas sumberdaya alam (lingkungan) disekitar perusahaan
- Keterbatasan akses masyarakat atas sumberdaya hutan

Tujuan

Tujuan *social forestry* hutan tanaman dengan pola kemitraan ini adalah untuk :

- Mengurangi resiko investasi
- Menambah ketersediaan bahan baku serpih bagi perusahaan
- Menciptakan peluang usaha bagi masyarakat
- Menjalin hubungan baik dengan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi operasi perusahaan
- Serta berperan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan kehutanan dan pembangunan masyarakat

Pelaksanaan Program

Pola kemitraan ini muncul karena kesadaran perusahaan, bahwa pengelolaan hutan secara lestari hanya akan dicapai jika tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pelaku usaha dan sumberdaya hutan sendiri. Sehingga memberikan akses masyarakat kepada sumberdaya hutan adalah salah satu bentuk kepedulian perusahaan. Selain itu dalam rangka menyelesaikan areal konsesi perusahaan yang di klaim oleh masyarakat maka perusahaan mengembangkan suatu pola kemitraan yang melibatkan masyarakat yang merasa memiliki hak atas areal tersebut. Dalam pola kemitraan ini dibangun Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK) di mana masyarakat memiliki hak atas hasil hutan dari areal yang dimitrakan. Perusahaan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar yang memiliki sumberdaya lahan yang tidak produktif dengan menggalakkan kegiatan

penghutan kembali areal-areal tidak berhutan dan lahan tidur di luar areal konsesi, dengan melakukan kerjasama dalam bentuk pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK).

HTPK merupakan kerjasama atau penyelesaian konflik akibat adanya klaim areal konsesi perusahaan oleh masyarakat, sehingga dicarikan jalan tengah dengan membangun hutan tanaman di mana masyarakat memiliki hak atas hasil hutan yang akan dipanen dari sebagian areal yang diklaim tersebut setelah melalui kesepakatan. Sedangkan HRPK merupakan kerjasama yang melibatkan masyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak mampu mengelola akibat terbatasnya sumberdaya setempat, sehingga pengelolaan diarahkan kepada hutan rakyat.

Dalam kerjasama dalam bentuk HRPK maupun HTPK dirasakan perlu ada dukungan dan peran perusahaan untuk mendorong dan membantu masyarakat memberdayakan diri sehingga selama menunggu saat panen tanaman pokok (*Accasia mangium*) selama 6 tahun, masyarakat dapat memperoleh penghasilan yang memadai sebagai bentuk usaha meringkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan penghasilan ini dituangkan dalam program *Community Development* yang implementasi operasionalnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan serta kemampuan masyarakat lokal secara spesifik. Untuk mengetahui kekhasan masing-masing daerah maka idealnya implementasi program harus didahului dengan survei sosial atau bahkan penelitian sosial, sehingga program yang diimplementasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan sekedar proyek mercusuar yang tidak dapat ditiru dan dipraktekkan oleh masyarakat secara berkesinambungan.

Profil Umum HRPK

HRPK merupakan usaha perusahaan untuk memperluas areal hutan tanaman di luar kawasan hutan dengan tujuan utama untuk menambah pasokan bahan baku serpih, sedang tujuan lainnya adalah untuk memanfaatkan lahan tidak produktif/tidur yang memiliki potensi kebakaran setiap tahunnya.

Kelola Kawasan

Areal-areal berhutan dan tidak berhutan yang tidak produktif dan berada di luar kawasan hutan (APL) yang secara ekonomis dan secara ekologis tidak lestari dilakukan pendataan. Bukti kepemilikan secara legal umumnya tidak tersedia. Oleh sebab itu inventarisasi dilakukan secara berkelompok. Perusahaan membantu melakukan survei dan pengukuran terhadap areal yang ditunjukkan oleh masyarakat, sehingga batas-batas areal menjadi jelas untuk menghindari terjadinya sengketa antara penduduk dikemudian hari. Proses sosialisasi terhadap program ini dilakukan dengan melibatkan aparat pemerintah setempat.

Kelola kelembagaan

Perusahaan juga membantu masyarakat yang terlibat dalam program HRPK untuk membentuk kelompok tani atau koperasi, sehingga dapat dilakukan pembinaan secara lebih terarah dan terprogram dalam rangka pemberdayaan kelompok dimaksud. Kelompok tani/koperasi ini kemudian menjadi wadah kegiatan produktif yang melibatkan anggotanya di mana perusahaan berperan sebagai mitra yang dapat menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan.

Kelola Bisnis

Melibatkan kelompok tani dalam pengelolaan hutan tanaman dari mulai persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan, baik sebagai pekerja langsung atau

sebagai kontraktor. Mendorong dan mendampingi petani dan/atau kelompok tani untuk melakukan usaha produktif dibidang agribisnis dan agroindustri dalam bentuk penyertaan modal/modal kerja, kerjasama bagi hasil. Beberapa komoditi telah diusahakan diantaranya ayam potong, ikan nila dan ikan patin, sayur-sayuran dan buah-buahan serta penggemukan sapi.

Realisasi Program: HRPK

Realisasi dari program HRPK melibatkan 8.734 KK untuk areal seluas 27.974 Ha dan saat ini sudah tertanam seluas 8.592 Ha atau 31%. Data secara rinci disajikan dalam Lampiran 1.

Profil Umum HTPK

Program HTPK adalah hasil dari penyelesaian klaim areal konsesi oleh masyarakat setempat, umumnya dari total area klaim sebagian dikembalikan sebagai hutan produksi dan dikelola sesuai dengan SK HPHT, sedangkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan penyelesaian klaim dijadikan areal Hutan Tanaman. Pola Kemitraan, dimana masyarakat memiliki hak atas hasil hutan yang dipanen dari areal dimaksud.

Kelola kawasan

Survei orientasi dilaksanakan berdasarkan peta arahan dan sket lokasi dari masyarakat yang mengajukan klaim, penggarap atau okupan dan berdasarkan peta kerja perusahaan berdasarkan izin yang diperoleh. Survei ini bertujuan mengetahui secara persis lokasi dan luas arel yang diklaim. Penyelesaian klaim melibatkan instansi terkait seperti Dinas Kehutanan dan aparat pemerintah daerah. Berdasarkan hasil survei dibuat berita acara penyelesaian klaim dengan melampirkan daftar hadir yang diketahui oleh Kepala desa dan Camat.

Kelola Kelembagaan

Masyarakat didorong untuk membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) dan kalau memungkinkan untuk dilanjutkan dengan pembentukan Koperasi dalam rangka mempermudah proses kerjasama dan proses pembinaan SDMnya.

Kelola Usaha

Berdasarkan kesepakatan penyelesaian klaim dibuat Kerjasama Kemitraan antara perusahaan dengan Kelompok Tani/Koperasi diketahui oleh Dinas Kehutanan, pejabat terkait di tingkat kabupaten.

Dalam pelaksanaan pembangunan HTPK ini kelompok tani mempunyai peluang untuk menjalankan usaha kontraktor mulai dari kegiatan pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan.

Di samping itu perusahaan akan mendorong terciptanya kegiatan usaha produktif dibidang agribisnis dan agroindustri dalam rangka meningkatkan penghasilan masyarakat sambil menanti hasil dari program penanaman hutan tanaman. Kegiatan ini berupa usaha produktif bidang agribisnis dan agroindustri yang melibatkan masyarakat secara individu maupun kelompok. Salah satu contoh kegiatan produktif adalah pembibitan akasia yang dilakukan oleh beberapa kelompok tani hutan dengan kapasitas bervariasi antara 500.000 sampai 1.500.000 batang per bulan.

Realisasi Program HTPK

Realisasi dari program HTPK meliputi areal seluas 5.241 Ha yang melibatkan 1.876 KK, yang saat ini baru terealisasi seluas 791 Ha atau 15%. Data secara rinci disajikan dalam Lampiran 2.

Hambatan Pelaksanaan Dan Resiko Investasi

Hambatan yang paling besar ditemukan dalam program HRPK, di mana masyarakat tidak dapat memegang komitmen untuk melaksanakan perjanjian secara konsisten. Beberapa kasus terjadi setelah panen daur pertama, masyarakat tidak mau meneruskan untuk daur kedua dan ingin menggantikan dengan tanaman lain seperti kelapa sawit. Keadaan ini sangat menyulitkan perusahaan mengingat infrastruktur (jalan, jembatan dan kanal) yang dibangun dalam rangka pembangunan hutan tanaman masih merupakan aset perusahaan yang belum habis masa manfaatnya (belum terdepresiasi secara penuh). Di samping itu banyak areal yang diklaim oleh masyarakat dan telah sepakat untuk dibuat program HTPK namun kenyataannya tetap tidak dapat dilaksanakan karena masyarakat tetap mempertahankan tanaman non hutan yang ada di areal tersebut.

Sementara itu usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan produktif juga banyak mengalami hambatan baik dari sisi teknis produksi maupun pemasarannya. Untuk itu perusahaan tetap melakukan pendampingan dan menanggung resiko kerugian apabila terjadi kegagalan produksi maupun kegagalan pemasaran.

Kesimpulan

Dalam rangka meningkatkan kualitas ekosistem usaha menghutankan kembali areal-areal yang telah tidak berhutan, semak belukar dan padang alang-alang maka pengembangan pola Hutan Rakyat Pola Kemitraan maupun Hutan Tanaman Pola Kemitraan merupakan model yang dapat memperkaya program *Social Forestry* yang dicanangkan oleh Departemen Kehutanan. Kendala pengelolaan kawasan akan menjadi issue utama apabila kepastian hukum terhadap izin yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat dijamin dalam implementasi program di lapangan. Untuk itu peran pemerintah dalam membantu penyelesaian konflik yang terjadi akibat adanya klaim lahan hutan merupakan keharusan di masa yang akan datang. Selain itu menghutankan lahan masyarakat yang tidak produktif dan mempunyai potensi kebakaran lahan setiap tahunnya harus dipikirkan insentifnya apabila dapat dijadikan Hutan Rakyat Pola Kemitraan, mengingat fungsi ekologis dapat dinikmati oleh semua pihak.

Lampiran 1.

**PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT POLA KEMITRAAN (HRPK)
PT.WIRAKARYA SAKTI**

I. WILAYAH KABUPATEN BATANG HARI

No	Kelompok Tani (KTH)	Lokasi		Jumlah Anggota (KK)	Luas lahan (Ha)		Tahun	
		Kecamatan	Desa		Rencana	Realisasi	Tanam	Rencana
1	Nawawi Taher	Batin XXIV	Karneo	54	136.00	75.78	1998	2004
2	Batin Indah	Ma. Bulian	Batin	99	246.60	133.26	1998	2003
3	Anugrah	Ma. Bulian	Bukit Paku	244	611.00	546.13	1997	2003
4	Tenera/Sabar Menanti	Ma. Bulian	Ma. Singoan	200	500.00	407.57	1997	2003
5	Tunas Harapan	Ma. Bulian	Petajin	36	90.00	40.06	1998	2004
6	Ismail.M	Ma. Tembesi	Rbt. Masam	40	100.00	50.00	1998	2004
7	Tunas Jaya	Ma. Tembesi	Rt. K. Tuo	195	154.40	136.87	1998	2004
8	Mawar	Pemayung	Awin	94	233.90	7.55	1998	2004
9	Rajali Syam	Pemayung	Jem. Emas	11	28.19	21.32	1998	2003
10	Husin AM	Pemayung	Kuap	22	54.46	45.29	1997	2003
11	K. Ratno Jayo	Pemayung	Kuap	120	300.00	480.50	1997	2003
12	Beringin Jaya	Pemayung	Lubuk Ruso	121	756.90	162.70	1997	2003
13	Ayu Lestari	Pemayung	Serasah	28	70.52	0.60	1998	2004
14	Rajali	Pemayung	Tere	131	328.23	10.47	1998	2004
15	Karya Maju/ Semoga Jaya	Ma. Tembesi	Rt. K Mudo	65	257.50	219.54	1998	2004
16	Mekar Sari/ Cahaya Baru	Ma. Tembesi	Tj. Marwo	45	650.00	316.22	1997	2003
17	Pemayung Jaya/ Harapan Jaya	Pemayung	Senaning	49	236.50	35.16	1997	2003
18	Lestari	Ma. Bulian	P. Terusan	195	2,793.00	0.00	-	-
19	Usaha Bakti	Ma. Bulian	Terusan Ilir	250	1,673.00	0.00	-	-
20	Jaya Bersama	Ma. Tembesi	Jebak	138	872.90	0.00	-	-
21	Mayang Mengurai	Mersam	Belanti Jaya	500	1,000.00	0.00	-	-
22	Tunas Baru	Pemayung	Kuap	600	1,200.00	24.40	2003	2009
23	Betung	Pemayung	Pulau Betung	13	178.70	15.30	2003	2009
24	Cahaya Sakti	Pemayung	Pulau Betung	460	1,200.00	0.00	-	-
TOTAL				3,710	13,671.80	2,728.72		

Lampiran 1. (lanjutan)

II. WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Kelompok Tani (KTH)	Lokasi		Jumlah Anggota (KK)	Luas Lahan (Ha)		Tahun	
		Kecamatan	Desa		Rencana	Realisasi	Tanam	Rencana Panen
1	Gunung Mas	Betara	Pem. Lumut	73	183.00	35.55	1997	2003
2	Ngudi Rahayu	Merlung	Ds. Mudo	38	95.90	78.09	1997	2003
3	A. Gunarto	Merlung	Ds. Mudo	11	28.60	28.07	1997	2003
4	Asiang (APJ)	Merlung	Lb. Terap	1	15.30	10.20	1997	2003
5	Buluh Jalar	Merlung	Lb. Terap	39	98.52	21.62	1997	2003
6	Syahbudin	Tungkal Ulu	Kp. Baru	1	8.00	4.00	1998	2004
7	M.Jukni/Syahbudin	Tungkal Ulu	Kp. Baru	33	81.50	36.30	1998	2004
8	Ibrahim	Tungkal Ulu	Kuala Dasal	1	5.35	19.79	1997	2003
9	Suparia	Tungkal Ulu	Suban	16	39.10	2.16	1997	2003
10	Thamrin Tomo	Tungkal Ulu	Suban	13	32.20	10.28	1998	2003
11	Syamli	Tungkal Ulu	T. Tinggi	1	46.00	11.20	2000	2006
12	Yusli A. Zalil	Tungkal Ulu	Taman Raja	1	2.35	1.81	1999	2005
13	M. Husin	Tungkal Ulu	Tj. Tayas	22	54.06	30.41	1997	2003
14	Purwanto	Tungkal Ulu	Tj. Tayas	30	100.00	34.91	1997	2003
15	Juwaldi	Tungkal Ulu	Tj. Tayas	40	100.00	14.29	1997	2003
16	Boimin	Tungkal Ulu	Tj. Tayas	40	100.00	45.24	1997	2003
17	Mulyono	Tungkal Ulu	Tj. Tayas	40	100.00	60.74	1997	2003
18	Usaha Belia	Betara	Pem. Lumut	198	448.00	102.20	2001	2007
19	M. Jani	Betara	Pem. Lumut	14	70.00	50.80	1997	2003
20	Keluarga	Betara	Pem. Lumut	32	185.70	106.60	2002	2008
21	KT. Prakarsa Mandiri	Betara	Pem. Lumut	53	47.00	0.00	2002	2008
22	KT. Prakarsa Mandiri	Betara	Pem. Lumut	53	329.50	0.00	2002	2008
23	Insan Cita	Merlung	Lb. Kambing	200	870.00	0.00	-	-
24	KT. Karya Maju	Merlung	Penyabungan	150	551.50	0.00	-	-
25	Pematang Tungkung	Pengabuan	Teluk Nilau	112	250.00	46.70	2003	2009
26	KT. Keruing Indah	Tungkal Ulu	Lubuk Bernai	357	729.00	0.00	-	-
27	Pancuran Gading	Tungkal Ulu	Suban	-	534.00	444.30	2001	2007
28	Tebing Jaya	Tungkal Ulu	T. Tinggi	-	10.80	40.00	2001	2007
29	Sumber Harapan	Tungkal Ulu	T. Tinggi	46	323.04	15.54	2001	2007
30	Tri Tunggal	Tungkal Ulu	Tebing Tinggi	80	354.00	4.50	2001	2007
31	Serumpun Jaya	Tungkal Ulu	Tebing Tinggi	125	340.00	8.60	2003	2009
32	Pematang Tungkung	Tungkal Ulu	Tebing Tinggi	202	765.70	677.80	2002	2008
33	Gerbang Harapan Berkat	Tungkal Ulu	Tebing Tinggi	149	330.70	354.10	2003	2009
34	KTH. Kelagian Jaya	Tungkal Ulu	Tebing Tinggi	249	500.00	472.60	2001	2007
35	KT. Kelagian Jaya	Tungkal Ulu	Tebing Tinggi	143	107.25	134.80	2002	2008
36	KT. Jaya Makmur	Tungkal Ulu	Tebing Tinggi	52	50.00	48.69	2002	2008
37	TKD. Tebing Tinggi	Tungkal Ulu	Tebing Tinggi	95	250.00	234.30	2003	2009
38	KT. Tebing Jaya	Tungkal Ulu	Tebing Tinggi	50	110.00	0.00	-	-
TOTAL				2,770	8,246.07	3,270.89		



Lampiran 1. (lanjutan)

III. WILAYAH KABUPATEN MUARO JAMBI

No	Kelompok Tani	Lokasi		Jumlah Anggota (KK)	Luas Lahan (Ha)		Tahun	
		Kecamatan	Desa		Rencana	Realisasi	Tanam	Rencana Panen
1	Aflis	Jambi Luar Kota	Maro Sebo	40	100.00	36.44	1998	2004
2	Penyadap Mas	Jambi Luar Kota	Muhajirin	64	160.00	124.70	1998	2004
3	Kwarda Jambi	Kumpeh Ulu	S. Gelam	80	200.00	34.30	1997	2003
4	Rukun	Kempeh Ulu	Tangkit	144	359.00	158.89	1997	2003
5	Lukman Tohir	Sekernan	Keranggan	94	235.00	16.70	1997	2003
6	Usaha Sepakat	Sekernan	P. Pulai	74	184.82	144.76	1997	2003
7	Harun Aroni	Sekernan	Sengeti	1	0.18	0.18	1997	2003
8	Sa'aban Ali	Sekernan	Sengeti	1	2.50	2.50	1997	2003
9	HM. Yusuf N	Sekernan	Sengeti	1	0.43	0.43	1997	2003
10	IAIN STS	Jambi Luar Kota	Sp. Sungai Duren	1	40.00	30.30	2003	2009
11	Bina Iestari	Kumpeh Ulu	S. T. Duren	125	278.00	0.00	-	-
12	Sukses Mandiri	Sekernan	B. Baling	175	1,014.00	0.00	-	-
13	Putra Hutan Mas	Sekernan	Tanjung Lanjut	229	393.00	477.30	2002	2008
TOTAL				1,029	2,966.93	1,126.50		

IV. WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Kelompok Tani (KTH)	Lokasi		Jumlah Anggota (KK)	Luas Lahan (Ha)		Tahun	
		Kecamatan	Desa		Rencana	Realisasi	Tanam	Rencana Panen
1	Harapan Berkah	Mendahara	Mendahara Ulu	-	25.30	12.90	2002	2008
2	Mantra Indah	Mendahara	P. Lagam	306	765.38	434.87	1997	2003
3	Bunga Raya	Mendahara	Rt. Karya	194	485.72	237.51	1997	2003
4	H. Zainudin	Mendahara	Simp. Tuan	19	47.69	28.69	1998	2003
5	Bakar AL Jufri	Rt. Rasau	Rasau Desa	425	1,062.00	267.06	1999	2005
6	Harapan Maju	Rt. Rasau	Rawasari	281	703.00	584.45	1997	2003
TOTAL				1,225	3,089.09	1,565.48		

GRAND TOTAL	8,734	27,973.89	8,591.59		
--------------------	--------------	------------------	-----------------	--	--

Keterangan : ⊗ = Dalam pelaksanaan panen daur 1

Lampiran 1**SUSUNAN ACARA
Seminar Masyarakat Sekitar Hutan**

Waktu : Minggu, 7 September 2003
Tempat : Ruang Sidang Sylva, Fakultas Kehutanan IPB
Tema : "Pengembangan sistem PHBM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah"

Susunan acara :

Pukul	Kegiatan	Narasumber
08.00-08.15	Pembukaan	-
08.15-08.30	Coffee Break	-
08.30-11.00	Seminar I : Potensi dan Permasalahan Masyarakat Sekitar Hutan serta Kontribusi Lembaga-lembaga Terkait dalam Pembangunan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat	1. Direktur Latin 2. Didik Suharjito
11.00-12.30	Rehat	-
12.30-15.00	Seminar II : Pola Pengembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat	1. Bupati Kuningan 2. PT. Wira Karya Sakti 3. Sinar Mas Grup
15.00-16.00	Perumusan dan Penyusunan Rencana Kerja Lanjutan	-
16.00-16.30	Penutupan Seminar	-

SUSUNAN KEPANITIAAN PIKNAS 2003

PELINDUNG

Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana
(Dekan Fakultas Kehutanan IPB)

PENASEHAT

Dr. Ir. Supriyanto, DEA
(Pembantu Dekan III Fakultas Kehutanan IPB)

PEMBINA

- Prof. Dudung Darusman
- Dr. Ir. Hariadi Kartodiharjo, MSc
 - Ir. Iwan Hilwan, MS
- Ir. Haryanto R. Putro, MS

PENANGGUNG JAWAB

Samsudin
(Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kehutanan IPB)

PANITIA PENGARAH

- Atang Trisnanto
- Dondy Anugrah
- Purwowidi A
- Benny EP
- Ery Permana
- Herdiyan
- Nur Maulana
- Irmon
- Agus haryanto
- Ariyadi Agustiono
- Ratih Damayanti
- Esih
- Wahyu F
- Fotina Ari
- Rahman Pasha
- Selvyana EA

PANITIA PELAKSANA

Ketua : Widy Prasojo
Sekretaris : Herdiansah
Bendahara I : Mutia Handayani
Bendahara II : Ety Marlina

BIRO-BIRO

Biro Kesekretariatan

Koordinator : Edwine SP

Anggota :

- ◇ Rudi Hadiano
- ◇ Iwan Kartiwan
- ◇ Reni M
- ◇ Memoi M
- ◇ M. Yazid
- ◇ Irina
- ◇ Al Chairi
- ◇ Alwiyah
- ◇ Siti Aisyah
- ◇ Agung Dwi

Biro Dana Usaha

Koordinator : Nanang TR

Anggota :

- | | | | |
|----------------|----------------|-------------|-------------------|
| ◇ M. Haris | ◇ Yulia H | ◇ Danang HA | ◇ Dwi Yandhi |
| ◇ Agung SW | ◇ Indra Wiguna | ◇ Lugina R | ◇ Ari Nurlia |
| ◇ Cempaka Sari | ◇ Dini R | ◇ Irwan S | ◇ Nurung Khususul |

Biro Acara

Koordinator : Mustaghfirin

Anggota :

- | | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| ◇ Indra Saputra | ◇ Laela Q | ◇ Agus R |
| ◇ Ayurani P | ◇ Udi Kusdinat | ◇ Rina Kristanti |
| ◇ Ika R | ◇ Ade M | ◇ Nurul SB |
| ◇ Iche Isma | ◇ Tri Khurnia | ◇ Yofi M |

Biro Humas

Koordinator : Toni Ismanto

Anggota :

- | | | |
|-----------------|--------------|---------------|
| ◇ Akbar sukmana | ◇ Ahmad Rudi | ◇ Eko Suwarno |
| ◇ Koswara | ◇ Pipiet | ◇ Lia |
| ◇ M. Reka P | ◇ Wawan | ◇ Sri P |

Biro Publikasi dan Dokumentasi

Koordinator : Muji B

Anggota :

- | | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ◇ M. Sofiyudin | ◇ Putra Agung | ◇ Buddy A | ◇ Eka Susan |
| ◇ Wahyu SP | ◇ Ghani Fahmi | ◇ R. Juwarno | ◇ Indri Puji R |
| ◇ Rina WR | ◇ Acep Komara | ◇ Dwi Cahya | ◇ Nurul I |
| ◇ Suherman | ◇ Nurul W | ◇ Gemellia TN | |

Biro Transportasi dan Logistik

Koordinator : Catur SU

Anggota :

- | | | | |
|---------------|-------------|--------------|----------------|
| ◇ M. Sukri | ◇ Priyo | ◇ Erlina D | ◇ Permana Yoga |
| ◇ Ari Susanto | ◇ Faisal OS | ◇ Kemas | ◇ M. Miftakhul |
| ◇ Nurul Husna | ◇ Lia K | ◇ Syufriandi | ◇ Arya A |

Biro Konsumsi

Koordinator : Christian N.B

Anggota :

- | | | | | |
|------------|---------------|-----------|-----------------|---------|
| ◇ Galih KS | ◇ Billy M | ◇ Puri P | ◇ Berlian Putri | ◇ Nia W |
| ◇ Reza NU | ◇ Siti Nurani | ◇ Elviena | ◇ Lisbeth Yuni | |

Seminar Masyarakat Sekitar Hutan

Koordinator : Soewarna

Anggota :

- | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|------------|------------|
| ▣ Kiki Amanda | ▣ Ery Hartanto | ▣ Yudo Pramono | ▣ Rudi R | ▣ Agustina |
| ▣ A. Faizal | ▣ Yana A | ▣ Anita K | ▣ Benny EP | ▣ M. Ari H |
| ▣ Rahmat B | ▣ Ade NS | ▣ Rini S | ▣ Reni M | ▣ Iwan S |
| ▣ Pramu Y | | | | |



